

**FACTSHEET**

# **KEBIJAKAN ANGGARAN SIAK HIJAU DALAM RENCANA PEMBANGUNAN 2021**

*"Review Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Siak 2021"*

**Penulis**

Gusmansyah, S.IP, M.IP

## A. PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Siak No. 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau, merupakan terobosan dan inisiatif untuk melakukan perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi dengan mengedepankan prinsip kelestarian, sekaligus dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Berdasarkan kebijakan jangka menengah daerah, Pemerintah Daerah menetapkan isu-isu strategis lingkungan hidup sebagaimana telah terintegrasi dengan kebijakan Siak Hijau, untuk mendukung pencapaian tujuan Siak Hijau, diantaranya; (1) menekan tingkat kerusakan Sumber Daya Alam khususnya gambut dan DAS Siak, (2) menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan, (3) pemanfaatan SDA tidak dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan Sumber Daya Alam tersebut, (4) kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi, dan (5) menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

Pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan Siak Hijau telah menetapkan Road-

map (peta jalan) sebagaimana tertuang dalam *Keputusan Bupati No. 650 tahun 2019*. Agar adanya akselerasi pembangunan daerah yang selaras mendukung Siak Hijau, pembangunan daerah harus dibangun dengan persepsi dan semangat yang sama dari berbagai Stackholder dan keberpihakan terhadap kebijakan program dan anggaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung kebijakan Siak Hijau.

Factsheet ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana kebijakan program dan anggaran Siak Hijau dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

## B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pendekatan implementasi kebijakan Siak Hijau mengacu pada tiga pendekatan, meliputi: Pendekatan Kebijakan yaitu mengarahkan semua kebijakan daerah dapat mendukung dan memfasilitasi komitmen Siak menuju Kabupaten Hijau; Pendekatan Landscape dan Pengelolaan Terbaik dengan cara mendorong inisiatif-inisiatif pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan ramah terhadap gambut dan lingkungan hidup lainnya; dan Pendekatan Ekonomi melalui ruang partisipasi aktif serta fasilitasi kepada masyarakat untuk bekerja dan beru-

saha hingga memperoleh manfaat ekonomi yang sejalan dengan upaya mewujudkan Siak sebagai Kabupaten Hijau.

Siak Kabupaten Hijau diuraikan sebagai bagian dari isu strategis pembangunan daerah yang tertuang dalam *RPJMD periode 2016-2021* setelah dilakukan perubahan pada tahun 2021, yang disebut sebagai pembangunan Kabupaten Hijau, meliputi: (1) mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup, (2) penyediaan infrastruktur dasar ekonomi, (3) penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, (4) penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut, (5) komitmen pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan dalam bentuk konservasi, dan (6) percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

## 2. Telaah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Hasil identifikasi isu-isu strategis daerah yang diuraikan dalam kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021, yang merupakan target akhir priode pembangunan daerah Kabupaten Siak, sudah seharusnya semua target dan indikator kinerja dapat tercapai. Namun, isu-isu strategis daerah belum mampu terselesaikan dengan baik, bahkan cenderung terjadi penurunan kinerja, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagaimana arah dan tujuan Siak Hijau.

Berdasarkan isu sektoral, khususnya urusan sektoral yang mendukung pencapaian Siak Hijau, yang terdapat pada 11 OPD sebagaimana di mandatkan dalam Keputusan Bupati Siak No. 650 tahun 2019 tentang peta jalan menuju Siak Kabupaten Hijau. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi relevan dengan tujuan Siak Hijau untuk dapat didukung dengan pembiayaan yang memadai pada tahun 2021.

**Tabel;** Identifikasi isu strategis daerah berdasarkan urusan sektoral yang selaras mendukung Siak Hijau, berdasarkan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2021

Urusan	Isu Strategis
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, tanah dan udara.</li> <li>• Belum tersedianya data tentang informasi SDA Lingkungan Hidup.</li> <li>• Kondisi Sungai Siak yang sudah tercemar berat;</li> <li>• Terbatasnya layanan angkutan dan pengolahan sampah;</li> <li>• Belum meratanya distrbusi layanan angkutan persampahan.</li> </ul>

<b>Penanggulangan Bencana</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya jumlah sarana prasarana penanganan bencana;</li><li>• Kebakaran hutan dan lahan gambut masih menjadi ancaman serius;</li></ul>
<b>Pertanian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunnya produksi padi pada tahun 2017 sebesar 34,9 ton dibandingkan dengan produksi tahun 2016 sebesar 38,1 ton.</li><li>• Masih terjadinya alih fungsi lahan masyarakat, khususnya pertanian tanaman pangan;</li><li>• Rendahnya produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat;</li><li>• Masih terbatasnya sarana prasarana pertanian-</li><li>• Usia perkebunan masyarakat sebagian besar sudah masuk usia tidak produktif lagi (rata-rata di atas 15 tahun), sehingga perlu peremajaan tanaman perkebunan;</li><li>• Masih rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani;</li></ul>
<b>Ketahanan Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih rendahnya ketersediaan pangan dan akses pangan, saat ini ketersediaan beras hanya mampu menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri sebesar 67%, sisanya harus dipasok dari luar daerah</li><li>• Belum optimalnya distribusi pemasaran hasil pertanian;</li><li>• Terbatasnya jumlah kelompok pangan yang dibina dan diawasi;</li></ul>
<b>Perikanan &amp; Peternakan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunnya produksi perikanan budi daya dan perikanan tangkap, pada tahun 2017 jumlah produksi sebesar 3.147,97 ton, lebih rendah di bandingkan produksi tahun 2016 sebesar 4.135,04 ton.</li><li>• Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan;</li></ul>
<b>Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum memadainya infrastruktur menuju destinasi pariwisata, khususnya wisata alam;</li><li>• Belum memadainya sarana prasarana pendukung destinasi wisata;</li><li>• Belum berkembangnya usaha wisata dan ekonomi kreatif;</li></ul>

<b>Perdagangan dan Industri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran pasar sebagai pusat perdagangan;</li> <li>• Terbatasnya sarana prasarana kemeterologian;</li> <li>• Belum optimalnya pengembangan KITB;</li> <li>• Belum berkembangnya IKM.</li> </ul>
<b>Tata Ruang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disahkannya perda RTRW dan turunannya;</li> </ul>
<b>Penanaman Modal &amp; Perizinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berfluktuasinya angka investasi ini disebabkan karena belum adanya kepastian hukum tentang tata ruang wilayah dan kondisi perekonomian global yang belum stabil;</li> </ul>
<b>Koperasi &amp; UMKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya jumlah UMKM yang berkualitas, pada tahun 2017 sebesar 65,61%</li> <li>• Masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif, yaitu tahun 2017 sebanyak 87 unit koperasi dari total 253 koperasi</li> </ul>
<b>Perencanaan Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan;</li> </ul>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian siak kabupaten hijau, masih menyisakan banyak permasalahan yang harus diselesaikan, apalagi diakhir priode pembangunan daerah 2016-2021, maka demikian isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan hijau harus menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Berdasarkan rencana pembangunan daerah

(RKPD) tahun 2021, Pemerintah Kabupaten siak, melalui rencana kerja 11 OPD yang dimandatkan untuk melaksanakan kebijakan siak hijau, ditetapkan target kinerja dan anggaran mendukung siak hijau mencapai Rp169,9 milyar. Dari lima sasaran siak hijau, alokasi anggaran terbesar di proyeksikan pada sasaran ke lima yaitu kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel;** Pagu Indikatif Kebijakan Anggaran Kabupaten Siak Tahun 2021, berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2021

No	Sasaran Kebijakan Siak Hijau	Target kinerja Akhir priode 2021	Proyeksi Anggaran 2021
1	Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak.	100%	52.058.467.478

2	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan.	100%	905.840.992
3	Pemanfaatan SDA dengan tidak berdampak terhadap kerusakan fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam.	100%	6.767.717.000
4	Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenaga kerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.	100%	1.789.554.843
5	Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi.	100%	108.427.165.461
<b>Total Proyeksi Anggaran Mendukung Siak Hijau</b>			<b>169.948.745.774</b>

**Sumber:** Dokumen RKPD Kab. Siak Tahun 2021

## C. Analisis Kebijakan Anggaran Tahun 2021

Arah kebijakan Siak Hijau sebagaimana yang telah terintegrasi kedalam kebijakan jangka menengah daerah RPJMD 2016-2021, juga demikian secara programatik Pemerintah Kabupaten Siak telah melaksanakan program kegiatan dan anggaran untuk mendukung implementasi Siak Hijau sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2020, dukungan anggaran terhadap siak hijau mengalami penurunan, yang disebabkan kondisi pandemi covid-19, bahkan kegiatan untuk belanja barang jasa dan modal yang berkaitan dengan dukungan siak hijau harus di realokasi untuk penanganan covid.

Dengan kondisi itu, kapasitas keuangan daerah menjadi tidak stabil yang menyebabkan program prioritas pembangunan daerah tidak dapat dibiayai, termasuk program kegiatan mendukung pencapaian Siak Hijau.

Dengan kondisi itu, kapasitas keuangan daerah menjadi tidak stabil yang menyebabkan program prioritas pembangunan daerah tidak dapat dibiayai, termasuk program kegiatan mendukung pencapaian siak hijau.

Pada tahun 2021, berdasarkan telaah dan analisis kebijakan anggaran, khususnya

melalui analisi rencana kerja dan anggaran pada sebelas OPD yang dimandatkan untuk mendukung implementasi siak hijau. Komitmen pemerintah daerah terhadap dukungan anggaran yang memadai merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan siak kabupaten hijau.

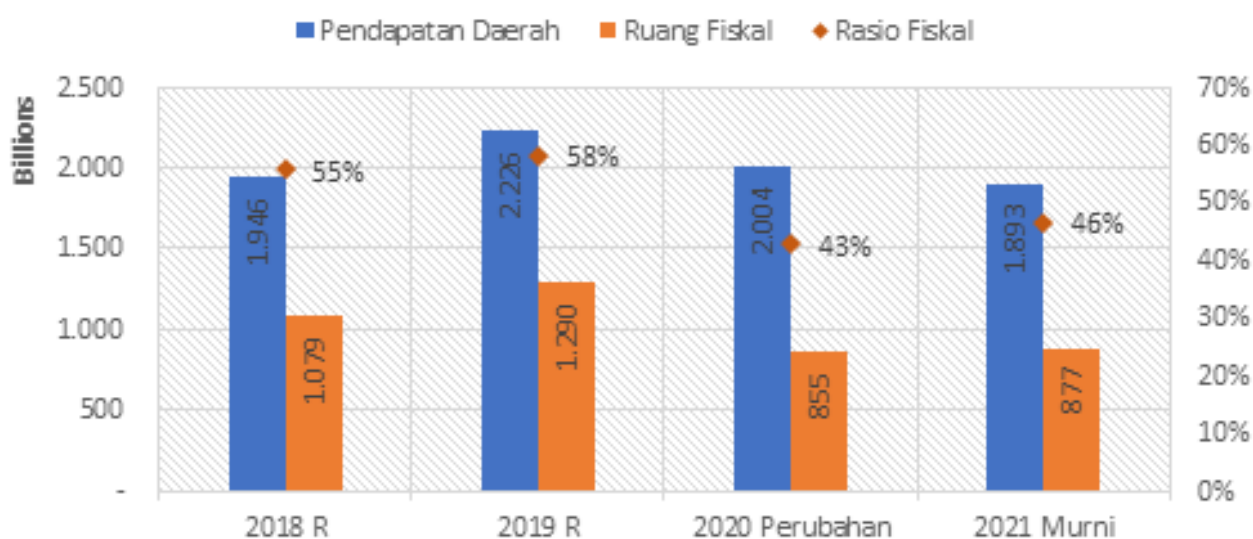
## 1. Kondisi Fiskal Kabupaten Siak

Rasio ruang fiskal daerah Kabupaten Siak di proyeksikan menurun pada tahun dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak normal akibat pandemi covid-19 dalam dua tahun terakhir. Pada priode sebelumnya kapasitas fiskal daerah kabupaten siak cukup baik dan mengalami peningkatan dari tahun

2018 sebesar 55% atau Rp1,9 triliun dan ditahun 2019 sebesar 58% atau Rp2,2 triliun.2021 yaitu sekitar 46% atau sebesar Rp877 milyar sedikit lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 43%, penyebab utama terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah

Rasio ruang fiskal daerah tersebut menjelaskan bahwa dari total pendapatan daerah yang diterima setiap tahun, tidak semuanya dapat di dayagunakan untuk mendukung pembangunan yang di prioritaskan dalam rencana jangka menengah daerah, dikarenakan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pendapatan hibah, dana penyesuaian sudah ditentukan peruntukannya untuk membiayai belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga.

**Grafik;** Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Siak Tahun 2018-2021



**Sumber;** APBD Kabupaten Siak Ta. 2018-2021

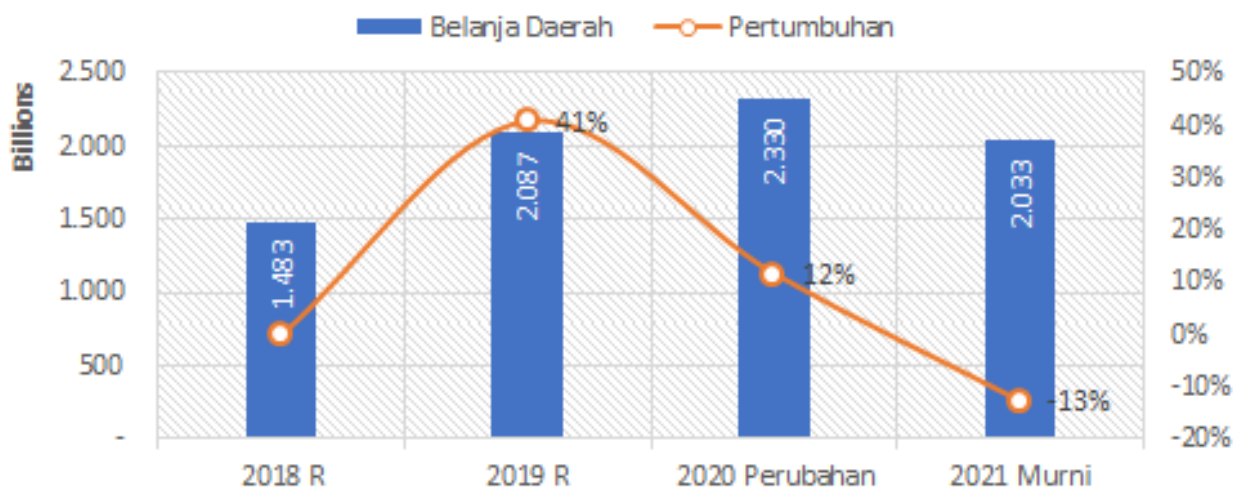
## 2. Orientasi Belanja Daerah Terhadap Siak Hijau

Proyeksi belanja daerah dalam empat tahun terakhir juga mengalami penurunan, sebelumnya pada realisasi belanja tahun 2018-2019 terjadi peningkatan yang cukup baik dengan pertumbuhan mencapai 41%, kemudian terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 yang diproyeksikan turun 12% , bahkan di tahun 2019 diproyeksi menurun minus -13%, penurunan belanja daerah sejumlah item belanja yang disebabkan penyesuaian pendapatan dan difokuskan untuk belanja penanganan covid-19 yang masih berlangsung dalam dua tahun terakhir.

untuk penanganan covid-19 terutama pada belanja barangjasa dan modal, termasuk pembiayaan yang direncanakan untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian siak hijau. Oleh karna itu, dalam analisis ini tidak menguraikan secara rinci terkait pembiayaan program kegiatan yang mendukung Siak Kabupaten Hijau di tahun 2020.

Alokasi belanja daerah dalam rangka mendukung siak kabupaten hijau, dari tahun 2017-2019 terdapat peningkatan antara 2,3% -3,1%, kemudian sampai dengan tahun 2021

**Grafik;** perkembangan belanja daerah kabupaten siak tahun 2018-2021



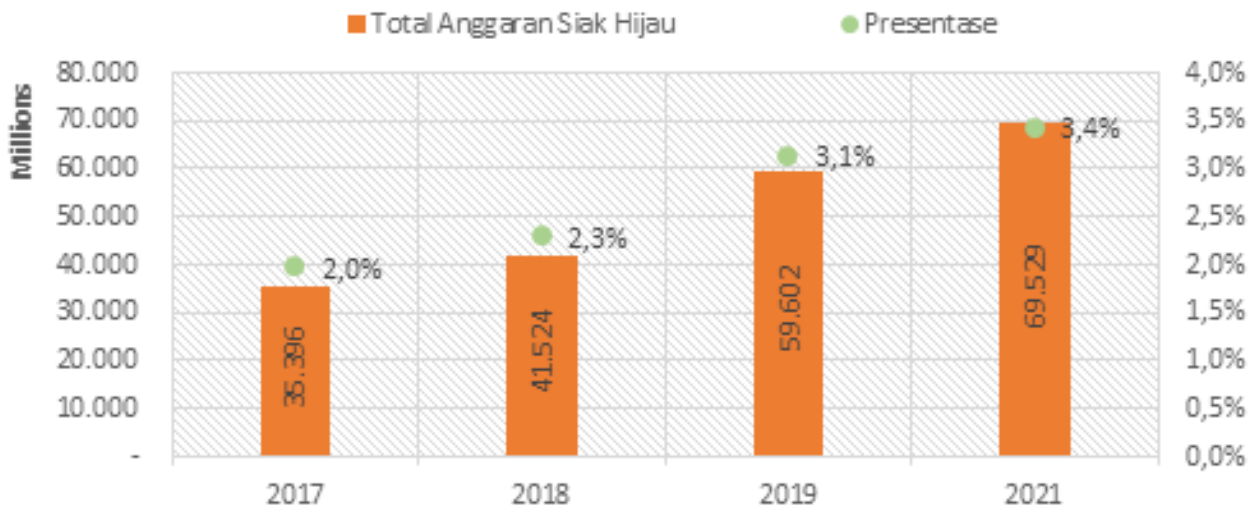
**Sumber;** APBD Kab. Siak – diolah

Kondisi pandemi covid disatu sisi dapat mempengaruhi perekonomian daerah yang berdampak pada menurunnya sejumlah target pendapatan. Disisi lain, sejumlah program prioritas daerah tidak dapat dibiayai dan tidak dilaksanakan khusus pada tahun anggaran 2020, yang disebabkan terjadinya rasionalisasi belanja yang cukup signifikan

naik menjadi 3,4% atau sebesar Rp69,5 milyar dari total belanja daerah sebesar Rp2,03 triliun. Belanja daerah yang mendukung agenda siak hijau tersebut dialokasikan melalui 11 OPD sebagaimana yang dimandatkan dalam Keputusan Bupati No. 650 tahun 2019 tentang peta jalan menuju Siak Kabupaten Hijau.



**Grafik;** Trend Belanja Daerah Mendukung Siak Hijau Tahun 2017-2019 & 2021

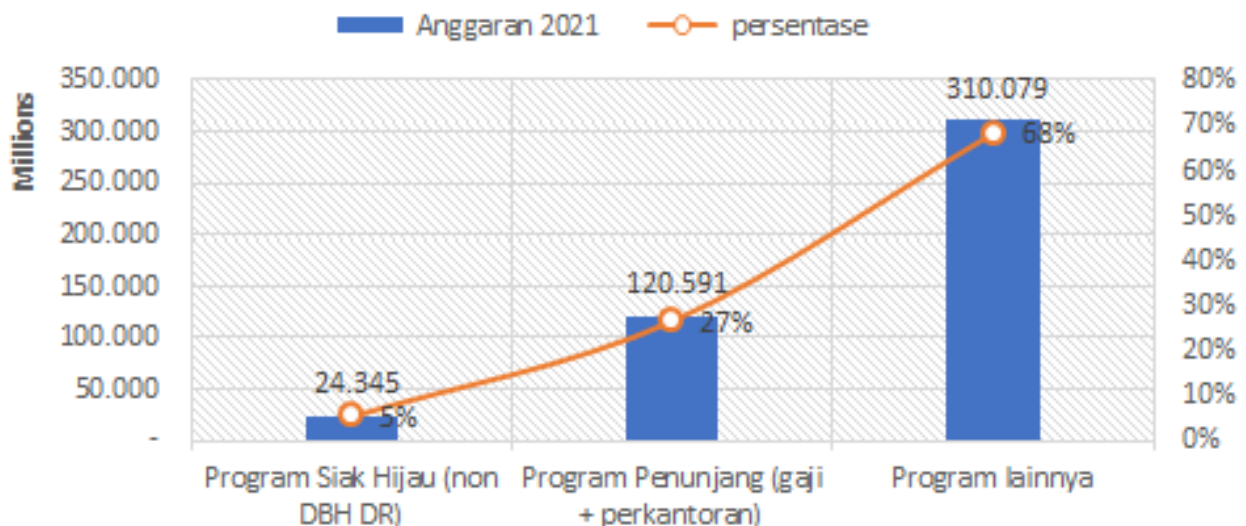


**Sumber;** APBD Siak Ta. 2017-2019 & 2021 - diolah

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi program kegiatan dan anggaran sesuai urusan sektoral yang melaksanakan agenda siak hijau, pada tahun 2021 terdapat Rp455 milyar yang dialokasikan pada 11 OPD yang dimandatkan mendukung siak hijau. Dari total alokasi anggaran tersebut terdapat Rp24,3 milyar atau sebesar 5% yang relevan

mendukung pencapaian siak hijau. Dari angka tersebut, dukungan anggaran terhadap siak hijau lebih rendah dari belanja program lainnya mencapai 68% atau Rp310 milyar dan 27% atau sebesar Rp120 milyar untuk program penunjang (gaji pegawai dan operasional kantor).

**Grafik;** Orientasi Belanja Daerah Mendukung Siak Hijau Tahun 2021



**Sumber;** APBD Siak Tahun 2021 - diolah

Berdasarkan tren belanja daerah yang mendukung siak hijau pada grafik diatas, pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam penetapan proyeksi belanja dalam APBD Murni 2021 terhadap alokasi belanja yang mendukung siak hijau cenderung lebih rendah dari program lainnya, yang menunjukkan bahwa program yang mendukung siak hijau belum menjadi program prioritas daerah, hal ini bertolak belakang dengan rencana pembangunan daerah yang telah disusun. Selain itu, rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap dukungan anggaran siak hijau pada tiga tahun terakhir tidak dijadikan bahan refleksi, evaluasi, dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.

## **Optimalisasi pemanfaatan Sisa DBH DR Tahun 2021**

Ketentuan pemanfaatan sisa DBH DR di Kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam PMK No. 122 tahun 2019, dapat digunakan untuk pengelolaan taman hutan raya (Tahura), pencegahan kebakaran hutan, pemulihan lingkungan hidup, dan kegiatan konservasi di wilayah pesisir dan pantai.

Dalam rangka mendukung implementasi pencapaian tujuan siak hijau, pemerintah kabupaten siak telah memanfaatkan sisa dana reboisasi yang masih terdapat pada kas daerah sejak tahun 2017 yang lalu sampai dengan saat ini. Pada tahun 2021, pemanfaatan sisa DBH DR mencapai Rp45,2 milyar dari total sisa DBH DR sebesar Rp71,5 milyar. Dengan demikian, pada tahun 2022 masih terdapat sisa DBH DR sebesar Rp26,3 milyar yang harus dihabiskan sebagaimana mandat PMK No. 122 tahun 2019 tersebut.

**Tabel;** Rencana pemanfaatan DBH DR Kabupaten Siak Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Sisa DBH DR 2021	OPD Pelaksana
1	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	595.602.600	Dinas Lingkungan Hidup
2	Patroli pencegahan karhutla secara terpadu	283.086.000	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dan karhutla	315.911.100	Dinas Lingkungan Hidup
4	Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi	265.995.800	Badan Penanggulangan Bencana

5	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla	38.397.442.000
6	Pelaksanaan Pemadaman Darat	5.326.475.800
<b>Total</b>		<b>45.184.513.300</b>

**Sumber:** RKA OPD Kab. Siak 2021

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan sisa DBH DR tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus merupakan OPD utama dalam implementasi siak kabupaten hijau. Artinya dukungan anggaran terhadap program siak hijau, di biayai dari sumber sisa DBH DR yang masih terdapat di kas daerah kabupaten siak sampai saat ini.

Artinya, pada tahun 2021 pemerintah kabupaten siak telah berkomitmen mendukung agenda siak hijau melalui program dan kegiatan pada 11 OPD yang di mandatkan menjalankan siak hijau dengan alokasi anggaran mencapai Rp69,5 milyar, anggaran tersebut bersumber dari pemanfaatan sisa DBH sebesar Rp45,2 milyar dan alokasi anggaran non DBH DR sebesar Rp24,3 milyar.

Kegiatan yang relevan mendukung siak hijau (Non DBH DR) tahun 2021	Pemanfaatan sisa DBH DR mendukung siak hijau tahun 2021	Pemanfaatan sisa DBH DR mendukung siak hijau tahun 2021
24.344.665.723	45.184.513.300	69.529.179.023

Perbandingan dukungan anggaran terhadap agenda Siak Hijau pada tahun 2019 dan tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 17% atau Rp9,9 milyar. dengan adanya peningkatan alokasi anggaran dalam rangka mendukung siak hijau pada tahun 2021 terutama bersumber dari pemanfaatan sisa DBH DR un-

tuk dapat di maksimalkan, pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 pemerintah kabupaten siak sama sekali tidak menggunakan sisa DBH DR tersebut, di sebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan akibat kondisi pandemi covid yang masih berlangsung.

Alokasi Anggaran Siak Hijau (11 OPD)	Tahun 2019	Tahun 2021	bertambah / (berkurang)	%
	59.602.148.108	69.529.179.023	9.927.030.915	17%

## D. REKOMENDASI

Berdasarkan telaah dan analisis terhadap dokumen kebijakan pembangunan (RKPD) dan dokumen anggaran (APBD) Kabupaten Siak tahun 2021, maka Fitra Riau sebagai bagian mitra pembangunan yang tergabung dalam sedagho siak, merekomendasikan dalam rangka untuk mempercepat pencapaian kebijakan siak hijau, sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi yang berdampak pada penurunan pendapatan dan belanja daerah, menyebabkan sejumlah program prioritas daerah tidak dapat di biayai, terutama untuk program dan kegiatan yang mendukung agenda siak hijau. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan realokasi anggaran pada program dan kegiatan yang tidak relevan mendukung siak hijau, untuk dialihkan untuk program prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
2. Pemerintah kabupaten siak secara berkelanjutan tetap pada menjalankan program prioritas daerah dalam mendukung agenda siak hijau, sekaligus menyediakan anggaran yang memadai, salah satunya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan penggunaan sisa DBH DR yang masih tersisa di kas daerah sampai tahun 2022, dapat digunakan untuk kegiatan pengendalian karhutla, kegiatan rehabilitasi hutan lahan dan DAS yang kritis, dan pengelolaan tahura, apalagi kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran kebijakan siak hijau;
3. Pemerintah daerah dapat memperkuat dan mengkonsolidasikan keterlibatan kampung dalam mendukung siak hijau, yaitu melalui pengaturan alokasi dana kampung berdasarkan indikator kinerja ekologi (Take), terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi melalui skema insentif/disinsentif yang dapat diberikan kepada kampung yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selaras dengan tujuan kebijakan siak hijau.
4. Dalam rangka percepatan implementasi siak hijau, pemerintah kabupaten siak dapat melakukan kerjasama pembangunan siak hijau dengan lintas pemerintah dan lintas sektor untuk mendukung pencapaian tujuan siak hijau. Terutama melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau yang memiliki platform pembangunan Riau Hijau dalam rangka mendukung implementasi siak hijau;

Factsheet ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana kebijakan program dan anggaran Siak Hijau dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.



## Social Media

 @FitraProvinsiRiau

 Fitra Provinsi Riau

 YouTube Fitra Riau

## Kontak

[sekretariat.fitrariau@gmail.com](mailto:sekretariat.fitrariau@gmail.com) - Email

[www.fitrariau.org](http://www.fitrariau.org) - Website